



Kebijakan Utama untuk Memerangi Ketidaksetaraan dan Eksklusi/Pengecualian

Terakhir direvisi: 28 Oktober 2020

Pada bulan September 2021, [Pathfinders Grand Challenge on Inequality and Exclusion](#) akan mengeluarkan menu komprehensif tentang opsi kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan pengecualian. Dua tahun setelah Grand Challenge ini dilakukan dan dengan tersisanya satu tahun lagi, untuk memandu dan mempertajam fokus pada tahap akhir riset tentang opsi kebijakan, kami menetapkan draf konsultasi tentang prioritas kebijakan untuk tanggapan segera dan jangka panjang.

Kerangka Kerja Menyeluruh: Sebagaimana diuraikan dalam [makalah perumusan kerangka Grand Challenge](#) (2019), sebuah kerangka kerja "*redistribusi dan pengakuan*" menyeluruh akan memandu penelitian dan pengembangan opsi kebijakan. Kebijakan diharapkan menghasilkan materi yang gamblang tentang redistribusi dan martabat/penghormatan; mencakup inklusi sosial dan politik, dan meliputi ketidaksetaraan umum serta pengecualian dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Opsi menu dimaksudkan untuk meliputi dan melengkapi kebijakan mendasar, seperti layanan publik universal, perpajakan progresif, dan hak-hak pekerja sebagaimana yang dicakup dalam [Indeks Komitmen untuk Menurangi Ketidaksetaraan](#).

Prioritas kebijakan dirangkum dalam tabel di bawah ini yang meliputi tiga area utama: politik (magenta), sosial (merah muda), dan ekonomi (jeruk).

<u>KEBIJAKAN MENDESAK (TERKAIT COVID-19)</u>	<u>KEBIJAKAN JANGKA PANJANG</u>
Akses ke teknologi medis	Memerangi pengaruh uang dalam politik
Pemulihan COVID-19 yang pro-miskin dan indikator pembelanjaan kelas menengah	Kontrak dan perjanjian sosial, termasuk perjanjian fiskal
Perlindungan sosial yang universal, bertarget, dan berbasis komunitas	Reformasi sistem peradilan
Keranjang konektivitas digital	Sumbangan bagi warga muda dan aset masyarakat
Kompensasi lebih tinggi untuk pekerja esensial/penting	Pencatatan aset global
Pajak solidaritas	Indeks peduli kesenjangan untuk ketidaksetaraan dan eksklusi
Pembiayaan untuk pembangunan: hak penarikan khusus dan keringanan utang	Reformasi perumahan dan tata kelola tanah
Kemitraan berbasis pemerintah ke dalam ruang sipil	Kesetaraan dan inklusivitas hasil pendidikan dan akses pengasuhan anak
Penerapan alat bantu pasca konflik bagi masyarakat yang terpolarisasi	Data yang lebih banyak dan lebih baik

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
PRIORITAS KEBIJAKAN MENDESAK (TERKAIT COVID-19)					
Akses ke teknologi medis (Internasional)	Perilaku persaingan di antara negara maju dan struktur HAKI saat ini menjadi kendala memproduksi vaksin dan perawatan COVID-19 dalam skala atau besaran yang sesuai. Rendahnya produksi vaksin dan pengobatan akan merugikan semua orang, dan akses yang tidak sama akan menimbulkan ketidakpercayaan.	Mendaftar ke COVAX dan Kerangka Kerja Setara (EAF); lobi untuk pendanaan negara-negara berpendapatan rendah; berpartisipasi dalam Pool Akses Teknologi COVID-19 WHO (CTAP); dan bekerja dengan pemegang Hak Kekayaan Intelektual untuk berbagi pengetahuan dan melisensikan produksi secara bersama. (Laporan akhir juga dapat memfokuskan pada peran rezim HAKI saat ini secara umum).	Di dalam negara, dengan menjajah di luar EAF akan menempatkan risiko dikecualikannya warga negara termiskin. Di antara negara-negara, tanpa ada perluasan produksi dan dukungan keuangan bagi mereka untuk membeli, teknologi medis akan kurang dapat diakses oleh negara-negara yang lebih miskin, dengan konsekuensi hilangnya jiwa dan dampak sosial ekonomi.	Kelompok yang kurang beruntung dan komunitas migran mengalami tingginya penularan COVID-19 dan tingkat kematian di banyak negara, dan perempuan menanggung dampak sosial ekonomi terberat: penajahan dan ketidakmampuan menyediakan teknologi pengujian dan perawatan serta vaksin dalam besaran yang sesuai akan merugikan kelompok-kelompok ini dalam proporsi yang timpang.	Keikutsertaan dalam COVAX dan penerapan EAF akan membantu mengoordinasikan permintaan dan memastikan negara yang lebih miskin mampu membayar. Keikutsertaan dal C-TAP dan tekanan pada perusahaan untuk melisensikan bersama akan membantu meningkatkan suplai. Bersama, ini akan mendorong produksi dalam besaran yang sesuai dan akses yang setara.
Indikator pengeluaran pemulihan COVID-19 (Dalam Negeri)	Paket stimulus tidak mesti pro-miskin/pro-kelas menengah. Kepercayaan kepada pemerintah, yang meningkat selama COVID-19, mengalami ancaman penurunan jika program stimulus dianggap memperburuk ketidaksetaraan, sebagaimana yang terjadi di tahun 2008.	Mengadopsi indikator praktik baik yang umum untuk persentase program stimulus yang memberi manfaat pada kelompok miskin dan menengah, yang diwakili dengan dukungan pada rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung Kemitraan Pemerintah Terbuka menjadi tolok ukur transparansi pengeluaran untuk pemulihan COVID-19.	Pengeluaran yang lebih pro-miskin dan pro-kelas menengah akan berdampak langsung pada tingkat ketidaksetaraan umum, sebaliknya, pengeluaran yang bocor ke orang yang sudah kaya akan memperburuk ketidaksetaraan ini.	Dengan mengamati indikator praktik yang baik, besar kemungkinan ajab menguntungkan kelompok yang terpinggirkan dan rumah tangga yang dikepalai perempuan yang sangat miskin; maka data terpilih dapat menjadi bagian dari desain.	Mengukur tingkat paket stimulus yang pro-miskin dan pro kelas menengah serta publikasinya akan membawa konsekuensi advokasi untuk membuatnya menjadi lebih pro kesetaraan dan inklusi.
Bantuan langsung tunai universal, bertarget masyarakat (Dalam Negeri)	Layanan bertarget dan perlindungan sosial, bila tidak dilengkapi dengan beberapa bantuan langsung tunai /transfer universal kepada masyarakat, terlalu sering menciptakan stigmatisasi, dan mengakibatkan kebocoran. Pendapatan Dasar Universal tidak layak karena alasan biaya.	Menyediakan perlindungan sosial berdasarkan bantuan langsung tunai serta dirancang bersama dengan penerima untuk meningkatkan rasa hormat, martabat, dan harmoni sosial, yang menggabungkan penggunaan program universal, bertarget dan berbasis komunitas.	Kombinasi program yang dirancang bersama yang memadukan dukungan universal dan bertarget menciptakan rasa memiliki tujuan bersama sembari memberi bantuan yang lebih besar dan proporsional kepada kelompok yang dikecualikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memperkuat empati dan keselarasan sosial.	Penerima sistem perlindungan sosial yang tidak proporsional berasal dari penduduk yang dikecualikan, pengenalan desain kode akan memberdayakan penerima dan memberi mereka martabat serta peluang material.	Dirancang bersama dengan penerima meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari program secara spesifik. Paduan berbasis universal, bertarget, dan komunitas meningkatkan keberlanjutan dari sistem secara keseluruhan.

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
Keranjang digital (Dalam Negeri)	COVID-19 telah menempatkan ketidaksetaraan yang gamblang dalam konektivitas digital baik di dalam maupun antar negara.	Memberikan akses ke 'keranjang digital' universal, perangkat keras dan akses internet yang terjangkau. Kemungkinan mencari sumber daya dari CSR/pajak solidaritas. Terlibat dengan IFI untuk membuat kembali kerangka konektivitas sebagai faktor pendukung pengembangan esensial, seperti akses ke jalan dan listrik.	Akan sangat penting bagi pekerja berpendapatan rendah untuk mengakses aktivitas ekonomi di masa mendatang, juga berdampak pada semua area ketidaksetaraan, termasuk kemampuan mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi politik.	Perempuan dan etnis atau kelompok ras yang memiliki sejarah yang kurang menguntungkan memiliki akses digital yang lebih rendah.	Menyediakan alat dan sarana untuk mengakses internet atas dasar kesetaraan akan mengurangi pemisah digital yang terus tumbuh dan membantu menjawab ketidaksetaraan struktural yang merupakan turunan sejarah.
Kompensasi pekerja esensial (Rumah tangga)	Risiko dan imbalan tidak seimbang dalam segmen pasar tenaga kerja di mana 'pekerjaan esensial' diselesaikan, banyak dari mereka yang menjaga ekonomi dan masyarakat tetap berfungsi adalah yang paling berisiko.	Membuat "kerangka kerja kesiapan krisis" yang menyediakan kompensasi lebih tinggi/bentuk dukungan luar biasa bagi pekerja yang menempatkan diri mereka terkena risiko untuk melakukan fungsi-fungsi esensial dalam suatu krisis (pasokan makanan, kesehatan, transportasi, dll.) sebagaimana kita melakukannya kepada tentara. Untuk mempertimbangkan di dalam kerangka kerja model bisnis yang lebih besar bagi penjagaan ekonomi, gaji minimum, kesehatan dan asuransi pengangguran, hak terhadap perundingan bersama, kebebasan berkumpul dan perlindungan sosial.	Pekerja yang ditargetkan adalah mereka yang berada di dasar spektrum pendapatan baik dalam sektor formal dan informal, sektor publik dan swasta. Kemungkinan akan didistribusikan ulang juga di ujung atas, memperkecil kesenjangan pendapatan dengan manajemen puncak dan pemegang ekuitas.	Pekerja pada sektor yang terpengaruh memiliki proporsi perempuan yang tidak sesuai di kebanyakan negara, dan dari komunitas serta minoritas di negara lainnya.	Selama krisis, para pekerja ini memainkan peran publik yang baik dengan mencegah risiko kepada yang lain dengan mengambil risiko yang lebih besar pada diri mereka sendiri dan keluarganya. Pemberian imbalan yang menciptakan penerimaan publik atas fungsi 'publik yang baik, dan memastikan investasi bersama dalam kesejahteraan kita bersama.
Pembiayaan global untuk pembangunan (Internasional)	Biaya memerangi COVID-19 dan menyediakan perlindungan sosial, bersama dengan menurunnya PDB dan pajak di sebagian besar negara, akan mengakibatkan krisis fiskal dan tindakan penghematan anti pembangunan, kecuali ruang fiskal yang lebih besar diciptakan.	Melakukan hak memesan efek terlebih dahulu Khusus luar biasa [1 triliun] untuk membantu pemulihan COVID-19 di tahun 2021. Melanjutkan perluasan DSSI, suatu paket keringanan utang komprehensif untuk disetujui selama tahun 2021, dikaitkan dengan dukungan berbasis dukungan pada usulan Dana untuk Semua Ekonomi COVID-19 (FACE)	Tanpa semua tindakan ini, ketidaksetaraan di dalam negara kemungkinan akan meningkat jika tindakan penghematan menghalangi pembelanjaan redistributif.	Peningkatan akses ke pembiayaan pembangunan tidak secara apriori menjamin dampak positif bagi kelompok yang terpinggirkan.	SDR berpotensi menjadi tindakan yang sama-sama menguntungkan dalam hubungan internasional karena mereka memperoleh manfaat dari semua negara dan tidak harus dibayar kembali. Akses lebih besar ke SDR, pengurangan utang, serta hibah FACE semestinya memberi kesempatan yang lebih besar ada pro-kesetaraan dan pengeluaran inklusi (dipadukan dengan

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
Pajak solidaritas (Internasional/ Dalam Negeri)	<p>COVID-19 dan dampaknya yang terkait telah menunjukkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan sistem pengadilan tidak cukup tangguh dan ulet untuk melayani semua warga. Sebagian perusahaan dan keluarga telah dapat melindungi diri mereka sendiri selama krisis (dan bahkan meraih keuntungan) sementara lainnya telah menderita, sehingga meningkatkan ketidaksetaraan secara keseluruhan.</p>	<p>Memperkenalkan pajak solidaritas atau tindakan administrasi pajak khusus diberikan untuk membayar barang publik - kesehatan, pendidikan, dan keadilan.</p> <p><i>Opsi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Windfall bagi perusahaan yang memperoleh keuntungan karena COVID-19; • Peningkatan tindakan administrasi pajak, menangkai penghindaran pajak dan celah pajak; • Dukungan dan lobi untuk persetujuan prinsip-prinsip pajak digital OECD (varian - tingkatkan/alokasi bagian FACE); • Dana Solidaritas, dengan kontribusi sukarela dari bisnis dan individu berkekayaan tinggi; • Mengenakan pajak pada mereka yang memperoleh pendapatan di atas ambang batas dapat bekerja dari rumah, yang pendapatannya tetap konstan atau meningkat. 	<p>Meningkatkan kesetaraan umum dalam dua cara; melalui pengurangan pendapatan atau kekayaan dari orang yang paling makmur, dan pembelanjan publik yang pro kaum miskin.</p>	<p>Layanan publik yang lebih baik akan memberi manfaat secara tidak proporsional kepada kaum yang lebih miskin dan bagian masyarakat yang lebih terpinggirkan; karena kelompok yang dikecualikan kurang terwakili di antara orang yang makmur, mereka akan membayar lebih sedikit namun akan memperoleh manfaat lebih banyak.</p>	<p>keterbukaan/transparansi dan pemantauan di bawah).</p> <p>Ini merupakan krisis bersama dan mereka yang berkemampuan membayar harus berkontribusi secara adil.</p> <p>Mengikat pengumpulan bentuk baru pendapatan untuk dibelanjakan pada barang masyarakat akan meningkatkan dukungan politik.</p>
Kemitraan pemerintah-masyarakat sipil untuk menjaga ruang sipil (Dalam Negeri)	<p>Ruang sipil semakin mengecil, namun demikian COVID-19 menunjukkan bahwa seluruh upaya masyarakat sangat penting bagi ketahanan saat krisis. CSO atau Organisasi Masyarakat Sipil sendiri semakin dituding sebagai memihak.</p>	<p>Menunjukkan komitmen yang dipimpin pemerintah untuk inklusi politik dan ruang sipil terbuka, bersama dengan komitmen masyarakat sipil atas inklusi, tata kelola yang baik, dan hak asasi manusia.</p>	<p>Kemitraan seluruh masyarakat dan tata kelola terbuka lebih mungkin daripada tertutup, mekanisme dari atas ke bawah untuk mengatasi pandemi dengan membangun kepercayaan dan arah untuk mengurangi ketidaksetaraan.</p>	<p>Hambatan ruang sipil terjadi dalam bentuk kemunduran dalam hak-hak perempuan di beberapa masyarakat, dan hak asasi manusia serta tindakan anti diskriminasi atas dasar ras, etnisitas, agama, asal usul negara di masyarakat lainnya pihak.</p>	<p>Komitmen yang dipimpin negara jauh lebih mungkin memengaruhi Pemerintah lain daripada komitmen yang dipimpin masyarakat sipil. ini harus difasilitasi dengan komitmen masyarakat sipil terhadap inklusi, tata kelola yang baik, dan hak-hak asasi manusia.</p>
Alat pasca-konflik untuk menjawab polarisasi pra konflik (Dalam negeri)	<p>Banyak politik yang terpolarisasi, yang menghambat kemampuannya menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan serta inklusi. Negara-negara pasca</p>	<p>Menerapkan alat pasca konflik untuk menumbuhkan inklusi politik dan persatuan di semua masyarakat, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi dialog nasional atau rekonsiliasi; • Komite perdamaian setempat; 	<p>Konsensus lebih baik pada fakta dan nilai akan meningkatkan kesetaraan partisipasi dalam proses elektoral dan proses politik lainnya. Komunikasi dan dialog</p>	<p>Terlibat dalam proses kebenaran, dialog, dan pada akhirnya rekonsiliasi melibatkan penerimaan dan konfrontasi kesalahan yang dilakukan pada kelompok yang</p>	<p>Masyarakat pasca konflik dan pasca otoriter adalah masyarakat yang paling berpengalaman dalam menyelesaikan dan memperbaiki perpecahan</p>

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
	konflik/pasca otoriter telah mengembangkan seperangkat alat, namun hanya digunakan setelah konflik pecah, bukan untuk mencegahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Komisi kebenaran dan sejarah Kurikulum pendidikan; Kontak orang ke orang. 	yang membaik akan menumbuhkan kepercayaan dan kesepahaman, memfasilitasi kebijakan yang pro kesetaraan.	secara historis dirugikan, dan menawarkan jalan untuk memerangi polarisasi.	masyarakat. Pengalaman ada di semua tingkat pendapatan (misalnya Jerman, Uruguay, Sierra Leone, Afrika Selatan) dan dapat diperluas hingga tindakan pencegahan tanpa harus terkena stigma.
PRIORITAS KEBIJAKAN JANGKA PANJANG					
Uang dalam politik (Dalam Negeri)	Sistem politik yang mana kelompok kaya dapat mengendalikan undang-undang dan kebijakan pada akhirnya akan berdampak pada anti-kesetaraan dan inklusi.	<i>(Menunggu makalah dari International IDEA).</i>			
Kesepakatan dan kontrak sosial (Dalam Negeri)	Di banyak negara terdapat penurunan kepercayaan pada lembaga, termasuk partai politik dan negara. Menolak keanggotaan serikat perdagangan juga merupakan pendorong ketidaksetaraan.	Mengadopsi perjanjian Kesepakatan Baru untuk pelajaran COVID-19 dan tantangan masa depan seperti ekonomi digital dan hijau (ramah lingkungan). Memanfaatkan desain berbeda sesuai kebutuhan tiap-tiap negara, namun dengan unsur bersama pada menumbuhkan dialog sosial dan memberikan insentif pada ekonomi digital dan hijau.	Tingkat dan densitas pengorganisasian dan proses dialog sosial yang terkait dengan perjanjian kesepakatan baru - dapat membantu memitigasi akibat disruptif sosial dari COVID-19 dan tantangan mendatang seperti substitusi teknologi serta transisi ekonomi hijau.	Perempuan serta kelompok terpinggirkan sering tertinggal baik dalam proses maupun substansi dari kontrak dan kesepakatan sosial.	Kontrak/kesepakatan sosial dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dapat merestrukturisasi cara ekonomi bekerja agar lebih setara dan inklusif, dan menetapkan standar yang baru untuk desain kebijakan inklusif (dibangun atas dasar pengalaman pada beberapa negara dalam dialog sosial untuk redistribusi dan untuk mencegah polarisasi).
Reformasi sistem peradilan (Dalam Negeri)	Sistem peradilan sering berpusat bukan pada orang serta kebutuhan hukumnya: namun sistem berlaku sebagai penguat ketidaksetaraan karena sulit diakses, rumit, dan adanya bias sistemis terhadap kelompok miskin serta terpinggirkan.	Gunakan pelacakan transparan dari hasil peradilan yang dipusatkan pada rakyat untuk menentukan prioritas reformasi hukum dan proses yang terutama relevan dengan ketidaksetaraan: di kebanyakan negara, sistem peradilan pidana, dan ketenagakerjaan, tanah dan perumahan, serta hukum dan proses yang terkait dengan keluarga.	Bila semua orang memiliki akses yang sama pada peradilan, hukum menciptakan tempat berinteraksi yang adil dan meniadakan perbedaan kekuasaan dan bukan malah membuatnya menjadi lebih buruk.	Perempuan serta masyarakat terpinggirkan kemungkinan besar tidak memiliki akses ke proses peradilan; dalam hal minoritas, terpenjara.	Memfokuskan manusia dan menyelesaikan serta mencegah masalah keadilan dapat mendorong transformasi sektor keadilan dan menciptakan hasil yang adil, sehingga orang dapat sepenuhnya berpartisipasi di masyarakat dan memberi kesempatan yang adil di dalam perekonomian.

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
Sumbangan bagi warga muda dan aset masyarakat (Dalam Negeri)	Anak muda di setiap negara sekarang ini menghadapi masa depan yang tidak pasti dari segi lapangan kerja dan pendapatan. Program dukungan pekerjaan tradisional adalah sementara dan secara umum memberi harapan bagi masa depan.	Memperkenalkan kebijakan yang membangun aset produktif melalui pemberian dari warga, misalnya melalui pelatihan transisional, dan program pelatihan ulang (terutama untuk kaum muda) yang membangun aset, menurut negara bagian (atau donor di beberapa LIC) yang menyamakan/mengalihkan tabungan yang dibuat pekerja selama periode program pelatihan, dan melalui penyamaan aset masyarakat.	Pekerja muda yang miskin, tidak bekerja, atau bekerja namun tidak tetap akan membangun asetnya untuk bertahan dan melindungi dari guncangan di masa depan sehingga mengurangi ketidaksetaraan kekayaan.	Kebijakan ini akan bermanfaat positif bagi laki-laki dan perempuan muda sesuai desain, dan dapat dibobotkan agar lebih cocok bagi komunitas miskin, mengurangi ketidaksetaraan kekayaan menurut kelompok ras, etnis, atau agama.	Anak muda yang telah terkena dampak negatif dari krisis keuangan sebelumnya, telah dirugikan oleh pandemi dari segi pendidikan serta prospek ekonomi, namun tidak memiliki aset untuk mengatasi krisis itu. Kebijakan ini akan membantu menanamkan solidaritas lintas generasi dan membangun dukungan yang dibutuhkan untuk bertahan dari guncangan serupa di masa mendatang.
Pencatatan set global (Internasional)	Negara berkembang merupakan korban utama dari hilangnya pendapatan karena larinya modal ke luar negeri. Estimasi dana global yang disimpan di negara-negara ber pajak rendah berkisar antara 3 dan 9 triliun dolar AS.	Membuat pencatatan aset global percontohan (mengidentifikasi kepemilikan penerima manfaatnya) sebagai tindakan melawan penggelapan pajak dan arus keuangan terlarang. Proyek percontohan dapat dilakukan di satu yurisdiksi yang disiapkan untuk bekerja sama, dan memeriksa satu atau dua kelas aset (misalnya real estat, sekuritas).	Arus keuangan terlarang itu menguntungkan orang kaya serta merugikan orang miskin, melalui karena pendapatan dan pengeluaran publik.	Sangat kecil kemungkinan bahwa penerima manfaat dari kurangnya transparansi keuangan saat ini adalah perempuan atau kelompok yang terpinggirkan; reformasi akan menguntungkan mereka atau paling tidak netral.	Berbagi informasi tentang kepemilikan kekayaan global adalah langkah ampuh untuk melawan korupsi serta penggelapan pajak.
Indeks peduli kesenjangan (Dalam Negeri)	Seiring pertumbuhan area perkotaan dan pinggiran perotaan di seluruh dunia, sering terdapat ketidaksetaraan di d alam lingkungan perkotaan, dan ini berpotensi kuat menimbulkan ketidakpuasan. Sebagian dari hal itu berasal dari tingkat dasar edukasi, kesehatan, atau pendapatan yang tidak sama, bagian dari layanan Pemerintah yang sering memperburuk perbedaan/kesenjangan.	Memantau kesenjangan dalam penyediaan layanan publik utama di lingkungan perkotaan (misalnya waktu tanggapan polisi, guru per kapita, atau pendaftaran pendidikan, jarak ke perawatan kesehatan darurat) dan berkomitmen pada penyeimbangan kembali hingga indikator hasil yang relevan (pendidikan, kesehatan, kejahatan, efektivitas politik) setara.	Penyediaan layanan publik sering kali memperburuk ketidaksetaraan alih-alih memperbaikinya, dengan informasi yang tepat, program publik dapat diarahkan untuk mengurangi ketidaksetaraan di perkotaan.	Sebagian besar ketidaksetaran sosial-ekonomi perkotaan terkait sangat kuat dengan pengelompokan fisik komunitas rasial, etnis, atau keagamaan.	Dengan menyediakan alat bantu yang mudah digunakan untuk memantau kesenjangan, baik toko reformasi Pemerintah dan advokat masyarakat sipil akan memiliki tambahan pengungkit untuk memengaruhi perubahan di tingkat lokal, di mana ia akan memiliki dampak tertinggi seketika.

NAMA	MASALAH	PROPOSAL KEBIJAKAN	DAMPAK UMUM PADA KETIDAKSETARAAN	INTERAKSI DENGAN TUMPANG TINDIHNYA KESENJANGAN	TEORI PERUBAHAN
Reformasi perumahan dan tata kelola tanah (Dalam Negeri)	Perumahan serta penggunaan tanah menjadi sumber pendapatan utama bagi orang kaya serta menjadi beban biaya yang utama bagi orang miskin: keputusan tentang perumahan dan penggunaan lahan umumnya kabur serta eksklusif.	Melakukan reformasi tata kelola tanah serta pengaturan tata kelola perumahan, dengan melakukan reformasi pada komposisi dan tingkat komite dan entitas pemerintah yang menentukan penggunaan lahan serta persetujuan pembangunannya.	Tata kelola daerah yang lebih inklusif menjadikan pandangan dan pertimbangan warga tercermin dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dan meningkatkan transparansi terjait penggunaan dana serta investasi strategis.	Mereformasi pengaturan tata kelola yang eksklusif akan memungkinkan perpindahan dari lingkungan yang lebih miskin serta memiliki proporsi jumlah etnis, ras, agama, dan kepala rumah tangga perempuan yang sangat tidak merata serta secara historis miskin.	Tata kelola perumahan dan tanah memiliki masalah “orang dalam-orang luar” di mana pemilik properti saat ini terwakili - namun kepentingan penyewa, kaum muda, dan mereka yang ingin bermigrasi ke daerah perkotaan yang berkembang tidak terwakili. Meningkatkan keberagaman dan memindahkan tingkatannya akan membuat hasilnya menjadi lebih adil.
Pendidikan & pengasuhan anak (Dalam Negeri)	Ketidaksetaraan dalam hasil pendidikan dan kurangnya akses pengasuhan anak menjadi bagian penting dari semakin meningkatnya ketimpangan kekayaan serta penurunan mobilitas sosial.	Berinvestasi dalam meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas hasil pendidikan serta akses pengasuhan anak, dengan fokus utama pada dimensi gender.	Pendidikan dan investasi dalam pengasuhan anak dapat berperan transformasional dalam mencegah pengulangan dan penyebaran ketidaksetaraan dan pengecualian.	Meski ketika angka pendaftaran meningkat, ketidaksetaraan hasil pendidikan dan pengasuhan anak terus melanggengkan ketidaksetaraan struktural yang diturunkan secara historis.	Fokus pada kesetaraan dalam hasil pembelajaran dasar secara strategis mendorong investasi dan sumber daya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam hasil pembelajaran, tanpa melupakan satu anak pun.
Data terpilah (Internasional/ Domestik)	Banyak sistem data yang sudah ada saat ini gagal menangkap ketidaksetaraan daripada kemiskinan dan pengalaman komunitas dan kelompok yang secara historis miskin.	Meningkatkan pengumpulan, penggunaan, dan pemantauan data terpilah, termasuk pemantauan dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui akses publik yang luas dan setara atas data.	Data yang lebih baik merupakan bagian yang penting untuk menjadikan ketidaksetaraan sebagai isu yang sama pentingnya dengan kemiskinan dalam kebijakan nasional dan diskusi pembangunan internasional.	Data merupakan bagian penting dari upaya inklusi yang lebih besar berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan disabilitas.	Bagi yang pengalamannya tidak terekam dalam data mudah terabaikan dalam hal kebijakan. Pemilahan serta segmentasi yang lebih besar dalam pengumpulan dan pemantauan data akan membuka jalan ke desain dan hasil kebijakan yang lebih baik.